KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 16-18 November 2019

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	BIsnis Indonesia Halaman 1	Sabtu, 16 November 2019	Berita foto	Presiden Joko Widodo Memberikan sambutan saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatra Terbanggi Besar-Pematang Panggang-kayu Agung di kilometre 240 mesuji, Lampung, Jumat (15/11) Ruas Jalan Tol Trans Sumatra tersebut merupakan yang terpanjang dengan total 189 km.
2	Kompas Jendela Halaman A	Sabtu, 16 November 2019	Menengok Tuah Di Likupang Timur	Wisatawan Mengambil foto di Pantai Pulisan, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (9/11?2019). Pantai ini merupakan destinasi wisata utama di wilayah yang bakal dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang karena airnya yang jernih dan pasir putihnya.
3	Media Indonesia Halaman 7	Sabtu, 16 November 2019	Dinas PUPR Depok Siap Antisipasi Banjir	Untuk menghadapi sejumlah ancaman bencana di musim penghujan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Depok mengklaim telah mempersiapkan berbagai langkah. Kepala seksi Oprasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Depok, Bachtiar Ardiansyah, sudah menginstruksikan seluruh satgas banjir setiap kecamatan untuk bekerja sama, di antaranya dengan melakukan pengerukan sungai atau kali seta drainase dan situ di kota depok.
4	Bisnis Indonesia Halaman 10	Sabtu, 16 November 2019	Ruas Tol Terpanjang Resmi Beroperasi	Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ruas tol tersebut menjadi yang terpanjang yang pernah diresmikan. “Tol dari Terbanggi Besar sampai Kayu Agung dengan Panjang (sekitar) 189, kilometre, ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan,” ujarnya saat meresmikan jalan tol tersebut, (15/11).
5	Koran Tempo Halaman 3	Senin, 18 November 2019	Banjir Masih Mengancam Ibu Kota	Adapun lima waduk yang telah dikeruk itu adalah Waduk Pluit, Melati, Teluk Gong, BPP Poncol, dan Embung Cenderawsih. Bahkan pemerintah telah membangun 10 waduk baru yang terbesar di lima wilayah Ibu Kota, yakni Waduk Cilangkap Giri kencana, Cimanggis, kampung Rambutan 1 dan 2, Pondok Rango, Pekayon, situ Rawa, Minyak, Embung Lapangan Merah, Embung Semper Barat Cilincing Embung Cakung Timur, dan pembangunan kali sepanjang 8.274 meter. “Pembangunan telah selesai pada September lalu,” ujarnya
6	Bisnis Indonesia Halaman 7	Senin, 18 November 2019	ATI Ingin Penindakan Odol Secara Terpadu	Penindakan di setiap mata rantai pergerakan kendaraan diharapkan bisa mengurangi kerugian adri praktik overdimension overloading (odol) yang mencapai triliunan rupiah.

7	Bisnis Indonesia Halaman 11	Senin, 18 November 2019	JSMR Lolos Permohonan PKPU	Jasa Marga (Persero), Tbk, dapat bernapas lega setelah lolos dari permohonan penundaan kawajiban pembayaran utang (PKPU)
8	Media Indonesia Halaman 13	Senin, 18 November 2019	DP Rumah Bersubsidi Diturunkan Jadi 1%	Kementarian Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengubah persyaratan uang muka Dari minimal 5% menjadi 1% untuk memudahkan persyaratan kepemilikan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah lewat Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
9	Kompas Halaman 17	Senin, 18 November 2019	Berita Foto	Foto aerial kontruksi tiga proyek infrastruktur nasional bersinggungan dengan Simpang Susun Cikunir di Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (17/11/2019) Proyek itu adalah pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Layang kereta ringan (LRT) Jabodebek , dan kereta cepat Jakarta-Bandung Pembangunan Tol Jakarta-Cikampek Layang Sepanjang 36,4 kilometer sudah mencapai 99 persen. Ruas ini diharapkan bia dibuka untuk umum pada Desember 2019.
10	Kompas Halaman 17	Senin, 18 November 2019	Nirsentu Butuh Integrasi	Program elektronifikasi jalan tol melalui transaksi nirsentuh diharapkan bisa di terapkan pada akhir tahun depan. Dengan proses transaksi yang lebih efesien, arus kendaraan diyakini lebih lancer, sementara funsi jalan tol lebih optimal.
11	Bisnis Indonesia Halaman 22	Senin, 18 November 2019	Infrastruktur KEK Likupang Dikebut	Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Likupang diuslkan oleh PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD), anak usaha Sintesa Group. Lokasi itu berada di dalam Kawasan seluas 197,4 hektare (ha) yang terdiri atas aspek komersial and nonkomersial.
12	Bisnis Indonesia Halaman 23	Senin, 18 November 2019	Pilih Tinggal di TOD atau Deket Tol?	Dalam Pengembangan Hunian Dengan kedua Konsep, antara transit ariented development (TOD) dan Kawasan hunia yang dekat dengan jalan tol, menurut manager Research and Consultancy Coldwell Banker Commercial Angra Angreni, masyarakat masa kini cenderung masih memilih Kawasan hunia yang dekat dengan jalan tol.

Judul	**Berita foto**	Tanggal	Sabtu, 16 November 2019
Media	BIsnis Indonesia Halaman 1		
Resume	Presiden Joko Widodo Memberikan sambutan saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatra Terbanggi Besar-Pematang Panggang-kayu Agung di kilometre 240 mesuji, Lampung, Jumat (15/11) Ruas Jalan Tol Trans Sumatra tersebut merupakan yang terpanjang dengan total 189 km.		

RESMIKAN JALAN TOL 189 KM

Antara/Ardiansyah

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatra Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung di Kilometer 240 Mesuji, Lampung, Jumat (15/11). Ruas Jalan Tol Trans Sumatra tersebut merupakan yang terpanjang dengan total 189 km.

Judul	**Menengok Tuah Di Likupang Timur**	Tanggal	Sabtu, 16 November 2019
Media	Kompas Jendela Halaman A		
Resume	Wisatawan Mengambil foto di Pantai Pulisan, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (9/11?2019). Pantai ini merupakan destinasi wisata utama di wilayah yang bakal dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang karena airnya yang jernih dan pasir putihnya.		

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Wisatawan mengambil foto di Pantai Pulisan, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (9/11/2019). Pantai ini merupakan destinasi wisata utama di wilayah yang bakal dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, karena airnya yang jernih dan pasir putihnya.

MENENGOK TUAH DI LIKUPANG TIMUR

SHARE

nanti di warung Ale.

Pantai semakin ramai. Ratusan orang dewasa dan anak-anak bermain ombak. Tiap pondok bambu heboh dengan keramaiannya masing-masing. Seakan adu keras: ada yang bermusik akustik, memutar lagu disko tanah, ada pula yang menggelar ibadah.

Rupanya, semua amplifier itu dapat berbunyi karena pasokan dari genset. Warung-warung hingga toilet juga mengandalkan genset. Listrik pun kadang ada, kadang tidak.

Mungkinkah ada perubahan jika nanti KEK pariwisata seluas 197,4 hektar terbentuk dari investasi Rp 7,1 triliun?

"Saya dengar, wilayah Pulisan tidak akan dibangun segera. Anggarannya tidak langsung turun. Jadi, kami tidak tahu apa akan ada perubahan," kata Ale.

Berdasarkan peta rencana PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD), Grup Sintesa) sebagai pengembang KEK pariwisata, wilayah sekitar Pantai Pulisan, Bukit Pulisan, dan Pantai Paal akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH). Bentuknya tidak akan diubah karena letaknya dekat hutan lindung.

General Manager Sintesa Group I Putu Anom Dharmaya mengatakan, investasi awal Rp 2 triliun pada 2020 hingga tiga tahun berikutnya dikhususkan untuk membangun kawasan saja. PT MPRD juga sudah meneken kerja sama dengan PT PLN untuk meningkatkan pasokan listrik. "Pasokan dari panel surya di Likupang Timur masih kurang," katanya.

Tantangan kini

Di tengah RTH dekat Pantai Pulisan akan dibangun kawasan vila, sedangkan pusat komersial di barat. Memang, tak terlihat penginapan sama sekali di sekitar Pantai Pulisan. CasaBaio Resort di Desa Maen adalah yang terdekat.

Pengembangan KEK Likupang seakan

Tidak mengherankan jika kawasan ekonomi khusus pariwisata dibentuk di Likupang Timur. Keindahan pantai, bukit, dan sabana menyatu dengan keramahan warga. Namun, di manakah peran warga kelak ketika proyek hotel dan resor berdiri di KEK pariwisata?

KRISTIAN OKA PRASETYADI

Biru laut menyambut di Pantai Pulisan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Makin dekat ke daratan, warnanya semakin lembut, bergradasi menjadi *turquoise*, lalu biru muda. Ombak biru menyapu hamparan pasir putih di pantai lalu menyeretnya kembali ke laut. Lelah perjalanan 58 kilometer dari Manado selama hampir 2 jam terbayar lunas.

Sabtu (9/10/2019) pagi, pantai di Kecamatan Likupang Timur itu berangsur ramai. Warung-warung di tepi pantai bersiap menyambut tamu, tak terkecuali warung milik Ale (35). "Saya Ale yang hitam manis, soalnya tidak ada orang putih manis," canda pria itu saat mengenalkan dirinya.

Ale tak segan mempromosikan obyek wisata di desanya, salah satunya Bukit Pulisan. Ketinggian bukit itu menawarkan pemandangan 360 derajat Laut Sulawesi, pantai, serta perbukit batu di sekitarnya "Pemandangan dari atas indah sekali. Harus naik sendiri ke sana, jangan cuma dengar dari cerita orang lain," katanya, memotivasi setengah menantang.

Bisa saja ke sana dengan mobil atau sepeda motor. Bahkan, sampai puncak bukit. Namun, perjalanan dengan perahu kayu menuju kaki bukit—ditambah pendakian singkatnya—jauh lebih berkesan. "Antar-jemput cuma Rp 20.000 per orang," kata Ale.

Aso, teman Ale, siap mengantar ke kaki Bukit Pulisan. Perahu kayu bercadik sepanjang 4 meter dan lebar 70 sentimeter miliknya telah siaga di tepi pantai. Melihat ada tamu yang akan diantar, beberapa nelayan lain dan dua anak kecil membantu mendorong perahu ke laut. Mesin diesel menyala, kapal melaju. "Dekat, cuma lima menit perjalanan," kata Aso.

Rupanya, lokasi kaki Bukit Pulisan jauh lebih indah dari dugaan awal. Setelah lebih dari lima menit perjalanan, perahu Aso menepi di sebuah pantai yang diapit dua bukit. Airnya jernih dan bening, pasirnya putih. Hampir seperti pantai milik pribadi, tiada orang lain di sana.

Di sisi belakang pantai, jalur pendakian ke bukit telah menanti. "Nanti saya kembali 1,5 jam lagi," kata Aso, lalu kembali ke Pantai Pulisan.

Pendakian cenderung singkat, hanya sekitar 15 menit. Tantangannya ada pada jalur terjal berbatu serta terik matahari. Namun, keindahan jua yang direngkuh di puncak. Owhh..., sungguh membebaskan.

Hamparan laut biru semakin jernih di pantai. Terumbu karang dan batu di dasar air tampak kebiruan. Pasir putih panati dirindangi pepohonan hijau. Di puncak Bukit Pulisan, warna-warni alam menari, menghiasi pertemuan bukit dan lautnya.

Dari puncak Bukit Pulisan pula, tampak hamparan sabana hijau kekuningan dikelilingi hutan lindung menyambut. Konturnya bergelombang, mengingatkan pada dunia Teletubbies.

Dengan segala kecantikannya, puncak Bukit Pulisan seperti menahbiskan dirinya sendiri menjadi titik wajib swafoto bagi wisatawan. Sayangnya, sabana itu sedang kering karena kemarau panjang. Pun, pepohonan di sekelilingnya. Bahkan, salib kayu di puncak bukit habis terbakar panas matahari.

Ketersediaan listrik

Warung Petrus (64) dan Dortji (63) adalah satu-satunya tujuan berteduh sambil melepas dahaga. Melihat pelanggan, Dortji berhenti memotong sayuran untuk bergabung dengan Petrus, seakan menyambut tamu di rumah sendiri.

Warung mereka buka pagi hingga pukul 19.00 Wita. "Orang-orang datang buat foto *prewedding*. Pagi mereka cari *sunrise*, sore cari *sunset*. Kalau sudah gelap, pakai lampu sendiri," kata Dortji.

Bertahun berjualan di puncak, listrik dari genset jadi andalan mereka meski saat ini sedang rusak. Mereka tak ikut menikmati daya dari tiang listrik di dekat warung. "Di bawah bukit, ada bungalo punya orang Jerman dan punya Sintesa (perusahaan hotel) di tepi pantai. Tiang listrik ini ada setelah itu dibangun," katanya.

Salah satu bungalo terletak di tepi pantai tujuan perahu Aso tadi. Tiang-tiang kayu yang tersambung memisahkan bungalo itu dari bagian pantai lainnya. Fungsinya sebagai pagar yang tak boleh dilewati warga sekitar ataupun turis.

Tak masalah bagi Petrus dan Dortji. Letak warung mereka yang strategis terus mengalirkan pemasukan. Solar tetap terbeli. Mereka juga menyediakan air di kamar mandi demi kenyamanan turis. Petrus mengatakan, 1.200 liter air dibeli dari Desa Pulisan di bawah bukit dengan biaya kirim Rp 100.000.

Tepat 1,5 jam, Aso menjemput. Kembali di Pantai Pulisan tengah hari, ikan bakar bertabur rica bakar dan tumis kangkung yang gurih me-

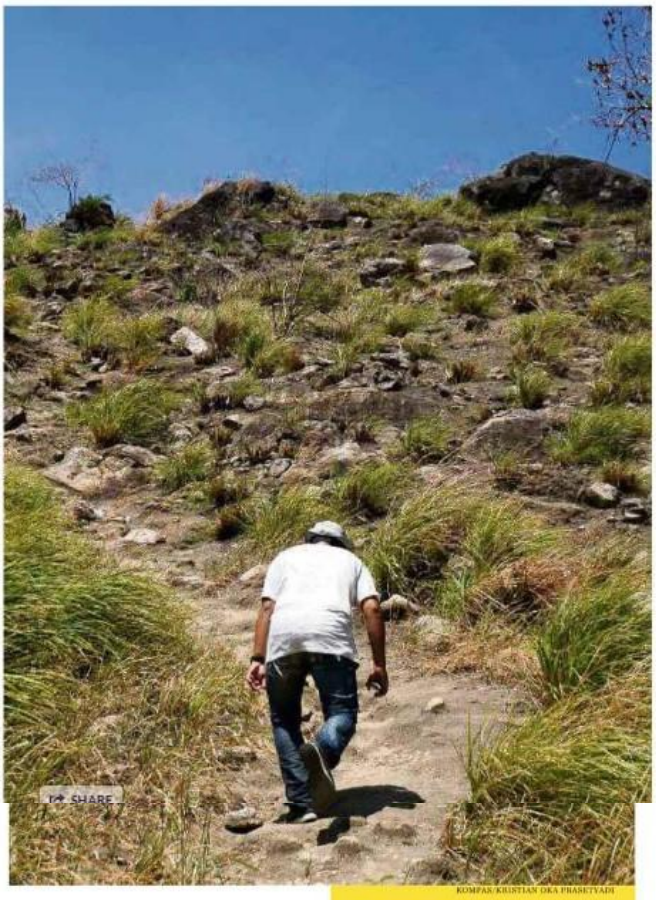

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Wisatawan mendaki Bukit Pulisan, Sabtu (9/11/2019), di Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Bukit ini salah satu destinasi wisata utama di wilayah calon Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang. Dari puncak, terlihat hamparan keindahan laut dan daratan.

sebuah misi mustahil. Area calon KEK, terutama di Desa Pulisan, Marinsow, dan Kinonang, sangat jarang penduduk. Ketimbang permukiman, lebih banyak semak dan pepohonan di kanan dan kiri jalan aspal. Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum terdekat pun entah berapa belas kilometer dari calon area KEK.

Sumber air entah berasal dari mana. Sinyal internet hanya sampai 2G, tak cukup kuat untuk membuka peta digital. Putu mengatakan, itu akan diatasi juga lewat kerja sama dengan PDAM, Telkom, hingga PT Perusahaan Gas Negara.

Area rural itu akan disulap menjadi area wisata dengan hotel, vila, dan resor berbasis pelestarian lingkungan. "Dasarnya *sustainable tourism*. Menjaga alam, melibatkan masyarakat lokal, dan mengangkat ekonomi daerah," kata Putu.

Putu melanjutkan, PT MPRD akan mengembangkan desa wisata dan kampung nelayan. Kemampuan masyarakat membuat oleh-oleh serta seni pertunjukan tradisional akan dikembangkan demi menghibur wisatawan. Tantangannya, warga di sana tak punya pusat-pusat kebudayaan.

"Nelayan bisa pakai perahunya untuk mengantar tamu. Seni tradisi akan dikembangkan di desa wisata supaya setiap malam ada pertunjukan. Kami akan gandeng CSR (tanggung jawab sosial korporasi) bank pemerintah untuk mengembangkannya," katanya.

Rencana pengembangan KEK Likupang membawa angin segar bagi warga. Wati (32), pemilik warung makan ikan bakar dan pom bensin mini di Desa Maen, telah membuktikan keuntungan dari keberadaan CasaBaio Resort yang telah berdiri bertahun-tahun.

"Kalau KEK nanti sudah ada, warung saya bisa lebih ramai. Selama ini, karyawan CasaBaio sering makan di sini. Warga yang pergi ke pantai juga sering mampir. Semoga makin banyak pembeli," katanya.

Optimisme Wati beralasan. Perkiraan PT MPRD, KEK Likupang akan diisi 7.430 kamar hotel dan resor serta 1.313 vila. Pembangunan penginapan kelas atas itu akan dimulai 2020.

Warga pun berbenah. "Kepala desa sudah minta warga ikut jaga kebersihan," katanya.

Dalam 10 tahun, KEK Likupang akan tuntas dan menjanjikan keuntungan bagi warga Kecamatan Likupang, PT MPRD, serta semua investor nantinya. "Investor sudah *ngantre*," kata Putu.

Data Penelitian dan Pengembangan *Kompas*, jumlah wisatawan mancanegara ke Sulut tumbuh dari 20.074 wisatawan pada 2011 menjadi 122.100 wisatawan pada 2018. Pemasukan sektor akomodasi pada produk domestik regional bruto (PDRB) Rp 115 miliar per tahun.

Bagi Minahasa Utara, sumbangan sektor akomodasi hotel dan restoran bagi PDRB-nya masih sekitar 1 persen. Itu setara Rp 83 miliar dari total PDRB Minahasa Utara sebesar Rp 7,8 triliun. Meski begitu, tren pertumbuhannya baik, sekitar 8,8 persen per tahun.

Pengembangan KEK pariwisata hampir pasti akan kian mendongkrak ekonomi Sulut dan Minahasa Utara. Namun, angka yang fantastis tak selamanya berarti baik, di antaranya jika dikaitkan dengan distribusi kesejahteraan.

Kini, sebagian masyarakat Likupang Timur siap menyambut wisatawan. Jika semua rencana berjalan lancar dan dikelola secara profesional, keindahan alam dan keramahan warga di sana adalah tuah, yang membawa kesejahteraan nyata bagi banyak pihak. Semoga.

Judul	**Dinas PUPR Depok Siap Antisipasi Banjir**	Tanggal	Sabtu, 16 November 2019
Media	Media Indonesia Halaman 7		
Resume	Untuk menghadapi sejumlah ancaman bencana di musim penghujan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Depok mengklaim telah mempersiapkan berbagai langkah. Kepala seksi Oprasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Depok, Bachtiar Ardiansyah, sudah menginstruksikan seluruh satgas banjir setiap kecamatan untuk bekerja sama, di antaranya dengan melakukan pengerukan sungai atau kali seta drainase dan situ di kota depok.		

Dinas PUPR Depok Siap Antisipasi Banjir

UNTUK menghadapi sejumlah ancaman bencana di musim penghujan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok mengklaim telah mempersiapkan berbagai langkah. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Depok, Bachtiar Ardiansyah, sudah menginstruksikan seluruh satgas banjir di setiap kecamatan untuk bekerja sama, di antaranya dengan melakukan pengerukan sungai atau kali serta drainase dan situ di Kota Depok.

"Jadi, kegiatan untuk pengerukan sungai, drainase, dan situ itu dilakukan sepanjang tahun ," kata Bachtiar di Dinas PUPR Kota Depok, kemarin.

Untuk pengerukan sedimentasi, satgas telah disiapkan sebanyak 121 orang yang tersebar di setiap kecamatan.

Kepala bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Depok Denny Setiawan mengatakan, tahun ini pihaknya menggelontorkan APBD Rp70 miliar untuk menormalisasi tiga situ serta perbaikan drainase, turap, dan kali di Kota Depok. Yakni, Situ Pladen, Kecamatan Beji, Situ Rawa Besar, Kecamatan Pancoranmas, dan Situ Sawangan , Kecamatan Bojongsari. (KG/J-2)

Judul	**Ruas Tol Terpanjang Resmi Beroperasi**	Tanggal	Sabtu, 16 November 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 10		
Resume	Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ruas tol tersebut menjadi yang terpanjang yang pernah diresmikan. "Tol dari Terbanggi Besar sampai Kayu Agung dengan Panjang (sekitar) 189, kilometre, ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan," ujarnya saat meresmikan jalan tol tersebut, (15/11).		

TRANS SUMATRA

Ruas Tol Terpanjang Resmi Beroperasi

Bisnis, BANDAR LAMPUNG — Ruas Tol Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung (Terpeka) sepanjang 189 kilometer mulai beroperasi. Tarif ruas tol terpanjang tersebut diperkirakan sekitar Rp900/km atau total sekitar Rp170.500.

Aprianus Doni Tolok
redaksi@bisnis.com

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ruas tol tersebut menjadi yang terpanjang yang pernah diresmikannya. "Tol dari Terbanggi Besar sampai Kayu Agung dengan panjang [sekitar] 189 kilometer, ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan," ujarnya saat meresmikan jalan tol tersebut, (15/11).

Keberadaan ruas tol di Sumatra itu diharapkannya akan berdampak positif, di antaranya menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru, perbaikan jaringan logistik yang lebih baik, dan menjadi fasilitas sentra-sentra produksi yang ada sehingga akses menuju ke pasar menjadi lebih cepat.

Dengan terselesaikannya Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang - Kayu Agung akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatra Selatan dari Pelabuhan Bakauheni.

Keberadaan ruas tol, yang diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menjadi bukti pemerataan pembangunan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Jalan tol tidak hanya di Jawa. Kita harapkan dari Lampung sampai Aceh kita selesaikan pada 2024 sepanjang 2.700 kilometer."

Dengan terselesaikannya Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang - Kayu Agung akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatra Selatan dari Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu masuk Pulau Sumatra ke wilayah timur Sumatra.

Terbanggi Besar–Pematang Panggang – Kayu Agung merupakan lanjutan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 141 kilometer yang sudah beroperasi sejak Maret 2019.

Adapun, ruas tol yang mulai dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) sejak Juli 2018 dengan biaya investasi sebesar Rp 21,95 triliun, juga berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai ruas tol terpanjang di Indonesia.

Kinerja positif HK ini juga diapresiasi Presiden karena pengerjaannya relatif cepat yakni hanya memakan waktu 841 hari atau sekitar 23 bulan.

Presiden mengatakan bahwa pada hari ini (sabtu (16/11) ruas tol ini sudah dapat digunakan secara gratis hingga satu bulan, usai prosesi simbolis peresmian tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang-Kayu Agung.

Adapun tarif ruas tol tersebut diperkirakan Rp900 per kilometer untuk golongan I atau kendaraan pribadi. Dengan panjang 189,2 kilometer maka biaya yang dikenakan kepada pengendara diperkirakan mencapai Rp170.500.

"Untuk jarak 189 kilometer, dengan Rp900 per kilometernya, itu jauh lebih murah dibandingkan tol di Jawa, sebagai tol baru tentunya. Sebagai perbandingan, di Jabodetabek ada Jorr II yang tarifnya Rp1.700 per kilometer," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit.

Kendati demikian, keputusan resmi terkait tarif masih menunggu instruksi Presiden Joko Widodo.

PALEMBANG–KAYU AGUNG

Dengan diresmikannya ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang—Kayu Agung, ruas jalan tol Palembang—Kayu Agung dipastikan beroperasional sebelum Hari Raya Natal 2019.

Kepala Proyek Seksi 1 Tol Palembang—Kayu Agung, Gunawan Joko, mengatakan saat ini sebetulnya ruas tol tersebut sudah dapat fungsional. "Saat ini belum dibuka untuk umum, sebab masih dalam tahap pengerjaan. Kami siap fungsional, untuk operasional harus ada layak uji," katanya.

Adapun saat ini progress pengerjaan jalan tol tersebut sudah mencapai 98,05%. Menurut Gunawan, tahapan pengerjaan yang belum selesai tinggal penyempurnaan, seperti pemasangan marka jalan dan penambahan rambu-rambu.

Selain itu, kata Gunawan, ada pula pengerjaan pengaspalan ulang di sejumlah titik di jalan tol tersebut.

Gunawan menerangkan, target operasional sebelum akhir tahun tersebut membuat pihaknya mengebut penyelesaiannya. Dengan demikian, masyarakat yang hendak melakukan mudik Natal dan libur Tahun Baru sudah bisa melintasi Tol Kayu Agung—Palembang.

Menurut dia, nantinya selama masa satu hingga dua pekan operasional, pengguna jalan tol tidak dikenakan tarif. "Setelah 2 minggu sosialisasi, barulah dikenakan tarif tol. Ini sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat."

Dia melanjutkan sebagian di ruas jalan tol ini dibangun di atas rawa. Namun pihaknya memastikan bahwa kontruksi di ruas jalan tol itu kuat dan aman. Pasalnya, pihaknya menerapkan sistem pengerjaan dengan vakum. "Pengerjaan ruas ini mayoritas menggunakan sistem vakum yang kemudian tanahnya dipadatkan. Kami pastikan nantinya kontruksi tidak ambles dan jalan sepanjang tol ini tidak bergelombang." *(Dinda Wulandari)*

Judul	**Banjir Masih Mengancam Ibu Kota**	Tanggal	Senin, 18 November 2019
Media	Koran Tempo Halaman 3		
Resume	Adapun lima waduk yang telah dikeruk itu adalah Waduk Pluit, Melati, Teluk Gong, BPP Poncol, dan Embung Cenderawsih. Bahkan pemerintah telah membangun 10 waduk baru yang terbesar di lima wilayah Ibu Kota, yakni Waduk Cilangkap Giri kencana, Cimanggis, kampung Rambutan 1 dan 2, Pondok Rango, Pekayon, situ Rawa, Minyak, Embung Lapangan Merah, Embung Semper Barat Cilincing Embung Cakung Timur, dan pembangunan kali sepanjang 8.274 meter. “Pembangunan telah selesai pada September lalu,” ujarnya		

METRO

Banjir Masih Mengancam Ibu Kota

Pembangunan sumur resapan dinilai cukup membantu mengurangi potensi banjir.

EDISI, 18 NOVEMBER 2019

Adapun lima waduk yang telah dikeruk itu adalah Waduk Pluit, Melati, Teluk Gong, BPP Poncol, dan Embung Cenderawasih. Bahkan pemerintah telah membangun 10 waduk baru yang tersebar di lima wilayah Ibu Kota, yakni Waduk Cilangkap Giri Kencana, Cimanggis, Kampung Rambutan 1 dan 2, Pondok Rangon, Pekayon, Situ Rawa Minyak, Embung Lapangan Merah, Embung Semper Barat Cilincing, Embung Cakung Timur, dan pembangunan kali sepanjang 8.274 meter. "Pembangunan telah selesai pada September lalu," ujarnya.

Untuk penanganan banjir, kata Juaini, Dinas Sumber Daya Air telah menyiagakan 133 unit pompa mobile dan 457 unit pompa stasioner di 165 lokasi. Pompa-pompa itu siap dioperasikan setiap saat di lokasi yang terdapat genangan air. "Kami juga menyiapkan 7.800 petugas yang tersebar di dinas dan wilayah," ujar Juaini. Selain mengoperasikan mesin pompa, petugas-petugas itu bisa sewaktu-waktu dikerahkan untuk membersihkan saluran air dan memantau lokasi rawan genangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada 25 kelurahan rawan banjir di Ibu Kota. Kelurahan-kelurahan itu tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.

Sebagai upaya antisipasi, BPBD telah membentuk tim pendukung penanganan bencana yang bersiaga selama 24 jam. "Kami bekerja sama dan berkoordinasi dengan SKPD terkait serta menyiapkan lokasi pengungsian," kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Subejo.

INGE KLARA SAFITRI

Lubang Penyerap Air

SUMUR resapan dinilai efektif untuk mengatasi genangan air hujan di Ibu Kota. Bahkan keberadaan sumur itu diperlukan untuk menjaga konservasi air tanah karena mampu menyerap air hujan agar tidak terbuang ke laut melalui saluran air dan sungai.

Profil sumur resapan di Jakarta:
- Diameter: 80 sentimeter
- Kedalaman: 2,5-3 meter
- Kapasitas: 960 meter kubik
- Dinding sumur: beton

Cara kerja:
- Air hujan masuk dan ditampung dalam sumur resapan.
- Air di dalam sumur resapan secara perlahan meresap ke dalam tanah.
- Air yang meresap akan masuk semakin dalam hingga menembus lapisan tanah tak jenuh.
- Jumlah air tanah yang terperangkap ke dalam lapisan akuifer akan bertambah.

Judul	**ATI Ingin Penindakan Odol Secara Terpadu**	Tanggal	Senin, 18 November 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Penindakan di setiap mata rantai pergerakan kendaraan diharapkan bisa mengurangi kerugian adri praktik overdimension overloading (odol) yang mencapai triliunan rupiah.		

JALAN TOL

ATI Ingin Penindakan Odol secara Terpadu

Bisnis, JAKARTA — Kalangan operator jalan tol meminta agar penindakan praktik melebihkan muatan dan melampaui dimensi pada kendaraan barang atau *overdimension overloading* dilakukan secara terpadu.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Penindakan di setiap mata rantai pergerakan kendaraan diharapkan bisa mengurangi kerugian dari praktik *overdimension overloading* (odol) yang mencapai triliunan rupiah.

Sekretaris Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono mengatakan bahwa penindakan praktik odol tidak bisa dilakukan parsial, terlebih hanya di jalan tol. Menurutnya, penindakan praktik harus dimulai dari hulu ke hilir.

"Jangan semata-mata upaya penindakan [odol] dilakukan ketika kendaraan sudah masuk di jalan tol! Pelaksanaannya harus terintegrasi di semua jaringan jalan baik nontol maupun tol," ujarnya kepada *Bisnis*, Minggu (17/11).

Krist menjelaskan bahwa praktik odol bisa dicegah sejak awal pada saat pengujian kendaraan untuk mendapatkan kelayakan operasi. Kendaraan odol juga bisa ditindak saat memuat atau membongkar barang di pusat-pusat kargo. Selanjutnya, ruang gerak kendaraan odol juga terpantau lewat pengawasan di titik-titik menuju jalan nasional.

Pekan lalu, ATI menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Korps Lalu Lintas Polri. Kesepahaman itu diambil terkait dengan pelaksanaan pengamanan, pelayanan bersama, penegakan hukum, dan pertukaran informasi di jalan tol.

Krist menyebutkan bahwa nota kesepahaman tersebut memperkuat tugas dan tanggung jawab tiap-tiap pihak dalam hal penanganan odol, terutama di jalan tol. Untuk itu, dia berharap agar tiap-tiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

"Kami juga berharap agar upaya ini bukan justru membebani para operator jalan tol dengan berbagai beban operasi dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan."

Secara umum, praktik odol merugikan penyelenggara jalan, baik jalan tol maupun jalan nontol.

Operator jalan tol harus mengeluarkan biaya lebih untuk pemeliharaan jalan karena praktik odol membuat kualitas jalan terdegradasi.

Praktik odol juga disebut turut memicu kecelakaan di jalan tol. Hal ini merujuk pada kecelakaan di KM 91 tol Cipularang pada September 2019. Kecelakaan yang melibatkan 20 kendaraan dan menewaskan delapan orang itu dipicu dua kendaraan truk yang diketahui melebihi kapasitas muat.

KERUGIAN OPERATOR

Secara umum, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebelumnya melansir bahwa kerugian operator jalan tol akibat praktik odol mencapai Rp1 triliun per kuartal III/2019.

▸ BPJT memperkirakan separuh dari kendaraan berat yang melintas di jalan tol terindikasi melakukan praktik odol.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan bahwa kendaraan odol membuat jalan tol lebih cepat rusak sehingga operator harus mengeluarkan biaya untuk perawatan jalan.

Dia memperkirakan separuh dari kendaraan berat yang melintas di jalan tol terindikasi melakukan praktik odol.

"Pendapatan jalan tol hingga akhir kuartal III/2019 itu sekitar Rp12 triliun. Kalau bicara kerugian sekitar Rp1 triliun, itu cukup signifikan terhadap pendapatan tersebut," jelas Danang.

Judul	**JSMR Lolos Permohonan PKPU**	Tanggal	Senin, 18 November 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 11		
Resume	Jasa Marga (Persero), Tbk, dapat bernapas lega setelah lolos dari permohonan penundaan kawajiban pembayaran utang (PKPU)		

▸ PROYEK TOL ULUJAMI-SERPONG

JSMR Lolos Permohonan PKPU

Bisnis, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dapat bernapas lega setelah lolos dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan yang diajukan oleh Muisah dan Musthafa Rachman.

Majelis hakim menyatakan permohonan PKPU yang diajukan oleh para pemohon terhadap BUMN penyelenggara jasa jalan tol itu tidak memenuhi UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kuasa hukum pemohon, Jeffrey mengatakan kreditur lain (Musthafa Rachman) sebagai pendamping kreditur pemohon (Muisah) mencabut kuasa terhadap kuasa hukumnya. Dengan demikian, syarat formalitas adanya dua kreditur dalam memohonkan PKPU tidak terpenuhi dan digugurkan pengadilan.

"Iya ditolak. Pengadilan menolak sehingga syarat dua kreditur tidak terpenuhi dan hanya tagihan dari pemohon Muisah yang diakui oleh majelis hakim," kata Jeffrey kepada *Bisnis*, Minggu (17/11).

Namun demikian, imbuhnya, Muisah tetap akan terus menagih ganti rugi pembebasan lahan proyek tol Jakarta-Serpong kepada Jasa Marga melalui permohonan PKPU. "Kami akan terus mencoba membantu ibu Muisah," ujarnya.

Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat diketahui bahwa permohonan PKPU terhadap Jasa Marga ditolak pada 23 Oktober 2019.

"Mengadili, menolak permohonan pemohon PKPU dan menghukum pemohon membayar biaya perkara," kata majelis hakim dalam amar putusan yang dikutip *Bisnis*, Minggu (17/11).

Perkara tersebut sejak didaftarkan pada 26 September 2019 hingga masuk persidangan dan putusan berlangsung singkat atau hanya 20 hari. Proses persidangan dua agenda sidang pertama pada 3 Oktober dan 7 Oktober 2019, serta diputuskan pada 23 Oktober 2019.

Sebelumnya, Corporate Secretary Jasa Marga M. Agus Setiawan mengatakan Jasa Marga dalam melakukan aktivitas korporasi selalu mengedepankan azas *Good Corporate Governance* (GCG).

"Sebagai perusahaan yang mengedepankan GCG, Jasa Marga akan menghadapi proses gugatan ini dan akan mengikuti proses hukum hingga dikeluarkannya putusan oleh Hakim Pengadilan Niaga," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (15/10).

Namun demikian, dia menegaskan Jasa Marga tidak dalam posisi untuk melaksanakan keputusan Pengadilan tersebut karena perseroan bukanlah pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembebasan tanah untuk jalan tol berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selain itu, Agus menambahkan yang lebih mendasar terhadap kedua bidang tanah di ruas Pondok Aren—Ulujami (yang digugat oleh Muisah) dan di wilayah Ceger (yang digugat oleh Mustafa Rahman) telah dilakukan pembayaran ganti rugi.

Dia menjelaskan dalam kasus Muisah telah dibayarkan oleh Jasa Marga selaku penerima kuasa dari Kementerian PUPR pada 2001. Sementara itu, dalam kasus Mustafa telah dibayarkan langsung oleh Kementerian PUPR berdasarkan rekomendasi dan penetapan dari Pantia Pengadaan Tanah (Walikota) pada 2003.

(Yanuarius Viodeogo)

Judul	**DP Rumah Bersubsidi Diturunkan Jadi 1%**	Tanggal	Senin, 18 November 2019
Media	Media Indonesia Halaman 13		
Resume	Kementarian Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengubah persyaratan uang muka Dari minimal 5% menjadi 1% untuk memudahkan persyaratan kepemilikan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah lewat Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).		

DP Rumah Bersubsidi Diturunkan Jadi 1%

Kementerian PU-Pera menerbitkan aturan yang bakal memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah bersubsidi.

Andhika Prasetyo
andhika@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengubah persyaratan uang muka dari minimal 5% menjadi 1% untuk memudahkan persyaratan kepemilikan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah lewat Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Wakil Menteri (Wamen) PU-Pera John Wempi Wetipo mengatakan kebijakan itu diambil untuk mendorong percepatan penyaluran dana bantuan pembiayaan tersebut. Pelonggaran pada persyaratan Program BP2BT itu diatur dalam Peraturan Menteri PU-Pera Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT yang baru saja diterbitkan.

"Beberapa ketentuan pada peraturan tersebut diubah. Misalnya, persyaratan uang muka yang semula minimal 5% menjadi 1%," ujar John dalam keterangan resminya di Jakarta, kemarin.

Dalam aturan baru itu, sambung John, persyaratan lama menabung pada sistem perbankan juga diubah, dari semula minimal enam bulan menjadi tiga bulan.

Pelonggaran persyaratan berikutnya ialah perpanjangan masa berlaku surat keputusan penerima manfaat BP2BT, ditambah dari semula 20 hari menjadi 30 hari.

Pelonggaran selanjutnya ialah relaksasi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum akad kredit menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.

Kementerian PU-Pera juga telah menerbitkan Keputusan Menteri PU-Pera Nomor 1013/KPTS/M/2019 tentang Batasan Lebar Kaveling Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi dan Lebar Kaveling Rumah Tapak Umum yang Diperoleh melalui Program BP2BT.

Aturan tersebut menetapkan relaksasi ketentuan lebar kaveling dari semula minimal enam meter menjadi paling rendah lima meter untuk *site plan* yang telah disetujui pemerintah daerah paling lambat 1 Oktober 2019.

IPEX 2019

PT Bank Tabungan Negara (BTN) kembali menyelenggarakan pameran perumahan tahunan IPEX.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank BTN Oni Febriarto mengatakan, sebagai pemimpin di pasar KPR, perhelatan IPEX menjadi upaya perseroan untuk ikut menggairahkan pasar properti.

"IPEX 2019 menjadi langkah perseroan untuk terus meningkatkan pangsa pasar kredit perumahan rakyat (KPR) di Tanah Air yang telah mencapai 40,31% per Juni 2019. Dari ajang tersebut, BTN mengincar potensi transaksi sebesar Rp3 triliun," ucapnya saat membuka IPEX 2019 di Jakarta, Sabtu (16/11).

Opsi strategis tersebut, tambah dia, juga sejalan dengan upaya bank sentral yang telah mendorong sektor properti melalui relaksasi aturan *loan to value* (LTV).

Apalagi sektor properti memiliki dampak berlipat yang positif bagi industri lainnya seperti bahan-bahan baku konstruksi

"IPEX kali ini menjadi upaya kami untuk menggerakkan perekonomian nasional, tidak hanya dari industri properti, tetapi juga sektor-sektor lainnya," ujar Oni.

Melalui pameran itu, Oni juga berharap masyarakat Indonesia akan kian mudah memperoleh hunian sejalan dengan komitmen perseroan dalam mendukung Program Satu Juta Rumah. (Ant/E-2)

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Senin, 18 November 2019
Media	Kompas Halaman 17		
Resume	Foto aerial kontruksi tiga proyek infrastruktur nasional bersinggungan dengan Simpang Susun Cikunir di Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (17/11/2019) Proyek itu adalah pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Layang kereta ringan (LRT) Jabodebek , dan kereta cepat Jakarta-Bandung Pembangunan Tol Jakarta-Cikampek Layang Sepanjang 36,4 kilometer sudah mencapai 99 persen. Ruas ini diharapkan bia dibuka untuk umum pada Desember 2019.		

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto aerial konstruksi tiga proyek infrastruktur nasional yang bersinggungan dengan Simpang Susun Cikunir di Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (17/11/2019). Ketiga proyek itu adalah pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Layang, kereta ringan (LRT) Jabodebek, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan Tol Jakarta-Cikampek Layang sepanjang 36,4 kilometer sudah mencapai 99 persen. Ruas ini diharapkan bisa dibuka untuk umum pada Desember 2019.

Judul	**Nirsentu Butuh Integrasi**	Tanggal	Senin, 18 November 2019
Media	Kompas Halaman 17		
Resume	Program elektronifikasi jalan tol melalui transaksi nirsentuh diharapkan bisa di terapkan pada akhir tahun depan. Dengan proses transaksi yang lebih efesien, arus kendaraan diyakini lebih lancer, sementara funsi jalan tol lebih optimal.		

Nirsentuh Butuh Integrasi

Studi kelayakan penerapan transaksi nirsentuh di jalan tol telah rampung. Lelang penyelenggara dijadwalkan pada awal 2020. Namun, sistem itu mensyaratkan integrasi.

JAKARTA, KOMPAS — Program elektronifikasi jalan tol melalui transaksi nirsentuh diharapkan bisa diterapkan pada akhir tahun depan. Dengan proses transaksi yang lebih efisien, arus kendaraan diyakini lebih lancar, sementara fungsi jalan tol lebih optimal.

Akan tetapi, penerapannya tak sekadar soal pemilihan teknologi. Transaksi tanpa sentuh di jalan tol membutuhkan integrasi data kendaraan, sistem pembayaran, dan penegakan hukum lalu lintas.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, studi kelayakan penerapan transaksi nirsentuh di jalan tol telah selesai disusun oleh Roatex, badan usaha dari Hongaria. Menurut rencana, pihaknya bakal melelang penyelenggara transaksi pada awal 2020. Namun, ada sejumlah hal yang mesti disiapkan dan dikoordinasikan dengan lembaga/instansi lain.

"Sistem transaksi nirsentuh sangat mengandalkan registrasi dan identifikasi secara elektronik. Sistem ini mesti dibangun, salah satunya melalui pertukaran data dan informasi," kata Danang di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ada tiga bagian yang mesti dipersiapkan untuk sistem transaksi nirsentuh. Di hulu, kendaraan mesti teregistrasi, sementara di tengah soal penggunaan teknologi, dan di hilir soal penegakan hukum. Menurut Danang, baik di hulu maupun di hilir memerlukan integrasi data dan melibatkan Kepolisian RI.

Adapun soal teknologi identifikasi kendaraan, ada beberapa jenis teknologi yang bisa diterapkan, antara lain *radio frequency identification* (RFID), *dedicated short range communication* (DSRC), *automatic number plate recognition* (ANPR), serta *global navigation system* atau sistem berbasis satelit. Kewenangan untuk penggunaan jenis teknologi berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Bank Indonesia (BI) mengusulkan agar dibuat nota kesepahaman spesifik untuk pengenalan sistem transaksi elektronik di jalan tol. Jadi, nota kesepahaman itu melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Asosiasi Tol Indonesia, dan BPJT," tutur Danang.

Akses penyelenggara pembayaran nirsentuh diharapkan terbuka bagi semua dompet elektronik atau tidak eksklusif. Soal sistem pembayaran juga diharapkan ada mekanisme penjaminan yang melibatkan lembaga penjamin untuk memastikan hak operator jalan tol terpenuhi.

Direktur Operasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur mengatakan, pihaknya tengah menguji coba sistem transaksi nirsentuh, baik dengan alat yang dipasang di kendaraan (*on board unit*/OBU) maupun teknologi berjenis RFID. Uji coba digelar di 38 titik gerbang tol di Jabodetabek dan 3 titik di Tol Bali Mandara. Pihaknya akan menambah lokasi uji coba sampai 200 titik.

Agar transaksi nirsentuh berjalan lancar, integrasi data harus dilakukan baik dengan pemerintah daerah maupun Kepolisian RI. Subakti mencontohkan, untuk penggunaan RFID, kendaraan mesti didaftar beserta surat tanda nomor kendaraan dan nama pemiliknya.

Terkait sistem pembayaran, menurut Subakti, yang diperlukan adalah sistem yang penetrasinya paling besar. Bagi operator, yang penting adalah penegakan hukum agar mereka tidak dirugikan.

Jangan membebani

Sementara itu, Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti Kris Ade Sudiyono mengatakan, pihaknya telah menguji coba transaksi nirsentuh berbasis DSRC. Uji coba ini dilakukan sekaligus bersama berbagai sistem pembayaran baik yang berbasis dompet elektronik maupun peladen.

Menurut Kris, tiga aspek yang harus dipenuhi dalam penerapan transaksi nirsentuh yaitu keandalan sistem, kemampuan beberapa sistem bekerja bersamaan (*interoperability*), serta kemungkinan untuk dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan. Kebutuhan di lapangan itu antara lain terkait sistem pengumpulan transaksi di tol, alat pembayaran, sistem pengenaan tarif jalan tol, serta integrasi di beberapa ruas jalan tol.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan, syarat penerapan transaksi nirsentuh di jalan tol adalah tidak akan menambah beban pengguna jalan tol melalui kenaikan tarif. Biaya dan keuntungan bagi penyelenggara transaksi nirsentuh berasal dari efisiensi yang diperoleh dari penerapan sistem itu. (NAD)

4 Tahap Menuju Pemberlakuan Sistem Transaksi di Jalan Tol Tanpa Henti untuk Multilajur

Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR

INFOGRAFIK ARIS

Judul	**Infrastruktur KEK Likupang Dikebut**	Tanggal	Senin, 18 November 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 22		
Resume	Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Likupang diuslkan oleh PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD), anak usaha Sintesa Group. Lokasi itu berada di dalam Kawasan seluas 197,4 hektare (ha) yang terdiri atas aspek komersial and nonkomersial.		

DESTINASI SUPERPRIORITAS

Infrastruktur KEK Likupang Dikebut

Bisnis, MANADO — Pembangunan infrastruktur untuk menunjang kawasan ekonomi khusus Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, tengah dikebut oleh pengembang dan pemerintah provinsi.

M. Nurhadi Pratomo & Dewi A. Zuhriyah
redaksi@bisnis.com

Total investasi yang masuk ke KEK Likupang diperkirakan mencapai Rp15 triliun.

Kawasan ekonomi khusus (KEK) Likupang diusulkan oleh PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD), anak usaha Sintesa Group. Lokasi itu berada di dalam kawasan seluas 197,4 hektare (ha) yang terdiri atas aspek komersial dan nonkomersial.

CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan bahwa aspek nonkomersial di antaranya infrastruktur pendukung seperti listrik, air bersih, jalan, serta pengolahan sampah atau *waste management* baik di dalam maupun di luar kawasan.

Selanjutnya, Shinta menyebut aspek komersial antara lain kawasan *resort*, hotel, *eco village*, *cultural village*, dan marina.

"Kami sedang mempersiapkan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan, desain teknis untuk desa budaya dan area konservasi, serta penjajakan kemitraan dengan beberapa pengembang untuk *resort* areanya," ujarnya kepada *Bisnis*, akhir pekan lalu.

Dia menyebut investasi yang dibutuhkan untuk membangun KEK Likupang sangat besar. Hal itu sejalan dengan luas kawasan dan juga ragam investasinya.

"Total investasi yang masuk diperkirakan mencapai Rp15 triliun," imbuhnya.

Shinta mengklaim akan banyak dampak positif yang didapatkan oleh Indonesia, khususnya Sulawesi Utara (Sulut), lewat pengembangan KEK Likupang. Salah satunya dengan masuknya investasi langsung kelas dunia yang akan masuk ke Bumi Nyiur Melambai.

Selain itu, pihaknya memproyeksikan penambahan devisa dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 25%—50% per tahun. Selanjutnya, kebutuhan tenaga kerja yang tumbuh mencapai 75% dibandingkan dengan tanpa adanya KEK Likupang.

Secara terpisah, General Manager Sintesa Peninsula Hotel Manado I Putu Anom mengatakan MPRD telah meneken nota kesepahaman dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tujuannnya, untuk memastikan pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, serta ketersediaan air bersih.

"Dari sisi infrastruktur penunjang sudah tidak ada masalah tinggal komitmen mereka semua," ujarnya.

Di sisi lain, pembangunan jalan Bandara Sam Ratulangi, Kota Manado menuju Likupang sepanjang 31,5 kilometer juga tengah dikebut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulut dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XV.

Sebelumnya, Steve H.A. Kepel, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjelaskan bahwa saat ini progres pekerjaan jalan Bandara—Likupang tengah berlangsung. Saat ini, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XV menurutnya sedang melebarkan jalan yang sudah ada dengan lebar rata-rata 7 meter.

Sementara itu, Steve menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melebarkan bagian lain dengan lebar 30 m. Saat ini, Pemprov telah mengerjakan pelebaran di sepanjang 4 km. "[Jalan Bandara—Likupang] harusnya akhir tahun 2020 sudah selesai terbangun," jelasnya.

Kepala Balai Pelaksana Jalan (BPJN) Wilayah XV mencakup Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo Triono Junoasmono menuturkan terdapat dua paket di proyek tersebut. Pertama, progres akses Likupang yang kini progresnya sudah 50% dan Girian—Likupang dengan progres 85%.

"Yang dua paket itu selesai Desember 2019. Tetapi, ada paket jembatan dan pelebaran jalan menuju Pantai Pulisan, Likupang, yang selesai semuanya pada 2020," paparnya.

PROSES PENETAPAN

Sekretaris Dewan KEK Enoh Suharto mengatakan saat ini peraturan pemerintah untuk KEK tersebut masih dalam proses penetapan. Selaras dengan hal tersebut, Enoh mengatakan, pemangku kepentingan lain seperti pemerintah daerah Sulawesi Utara juga sedang mempersiapkan kelembagaannya.

Dalam hal ini, ketika PP tersebut telah terbit, Pemda Sulut akan mengusulkan susunan dewan kawasan kepada Dewan Nasional KEK. Setelah itu, dewan kawasan akan membentuk sekretariat dewan kawasan yang kemudian membentuk administrator KEK untuk memberikan pelayanan investasi di KEK tersebut.

"PP dalam proses penetapan. Paralel dengan hal tersebut, pemda sedang menyiapkan kelembagaannya, sementara pengusul KEK sedang mempersiapkan *basic desain*, *detail engineering* dan pematangan lahan," katanya kepada *Bisnis*, Minggu (17/11).

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti mengatakan PP KEK Pariwisata Likupang ditargetkan selesai pada akhir 2019. Dia mengatakan, KEK Likupang diharapkan bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara sebanyak 6 kali lipat.

"Begitu juga pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) dari sekitar 2 juta menjadi 4 juta atau dua kali lipat, 200%, padahal di daerah lain hanya sekitar 5% sampai 10%," kata Guntur.

Optimisme itu dilandasi karena Likupang memiliki banyak daya tarik bagi wisatawan sehingga wajar jika wilayah di Sulut itu ditetapkan menjadi salah satu destinasi superprioritas yang harus rampung pada 2020.

Dalam hal penginapan, Guntur mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan potensi *homestay* di sejumah wilayah Likupang yaitu di Desa Marinsow, Desa Pulisan, Desa Kinunang, Desa Bahoi, dan Desa Pulau Gangga.

Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azhari mengimbau agar pemerintah tak hanya fokus pada wisata alam saja. Hal itu akan menyebabkan rendahnya daya tarik bagi para wisatawan khususnya wisatawan mancanegara.

Magnet Wisata di Ujung Utara

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang sebagai salah satu dari destinasi superprioritas masih terus berlangsung hingga 2020. Destinasi di Sulawesi Utara tersebut diusulkan menjadi KEK oleh PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD).

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Pulisan Likupang

- Masa pengembangan: **20 tahun**
- Luas lahan: **197,4 hektare**
- Target lapangan kerja: **65.000 orang**

Proyek infrastruktur penunjang:

- Jalan Bandara Sam Ratulangi–Likupang 31,5 kilometer.
- Pembangunan dermaga Lepeh dan Likupang.
- Perbaikan Terminal Bus Tipe A di Tangkoko, Bitung.
- Renovasi pelabuhan dengan nilai investasi Rp100 miliar.
- Perpanjangan *runway* bandara Sam Ratulangi 2.800 meter.

Sumber: Pemberitaan Bisnis — Bisnis/Patricia Cahya Pratiwi

Bisnis/M. Nurhadi Pratomo

Judul	**Pilih Tinggal di TOD atau Deket Tol?**	Tanggal	Senin, 18 November 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 23		
Resume	Dalam Pengembangan Hunian Dengan kedua Konsep, antara transit ariented development (TOD) dan Kawasan hunia yang dekat dengan jalan tol, menurut manager Research and Consultancy Coldwell Banker Commercial Angra Angreni, masyarakat masa kini cenderung masih memilih Kawasan hunia yang dekat dengan jalan tol.		

HUNIAN PERKOTAAN

Pilih Tinggal di TOD atau Dekat Tol?

Bisnis, JAKARTA — Perkembangan infrastruktur yang begitu pesat saat ini dapat menjadi nilai tambah bagi properti-properti yang dijual di sekitarnya. Penjual banyak mengedepankan nilai seperti akses yang lebih mudah karena dekat dengan jalan tol atau terintegrasi karena tak jauh dari moda transportasi massal.

Mutiara Nabila
redaksi@bisnis.com

Dalam pengembangan hunian dengan kedua konsep, antara *transit oriented development* (TOD) dan kawasan hunian yang dekat dengan jalan tol, menurut Manager Research and Consultancy Coldwell Banker Commercial Angra Angreni, masyarakat masa kini cenderung masih memilih kawasan hunian yang dekat dengan jalan tol.

Angra menyebutkan bahwa kedua konsep memiliki kelebihan masing-masing. Keberadaan kawasan yang terintegrasi dengan moda transportasi atau TOD, bisa membantu penghuni menghemat waktu dan biaya, memberi dampak positif terhadap udara dan lingkungan karena berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi, dan dapat mengurai atau terhindar dari kemacetan.

"Hal ini bisa meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjangkau pusat-pusat aktivitas yang lebih banyak dan beragam," katanya kepada *Bisnis*, Minggu (17/11).

▸ Hingga kini, belum ada pengembangan yang benar-benar sesuai dengan standar TOD sehingga konsumen masih banyak pertimbangan untuk memutuskan membeli.

▸ Salah satu yang menjadi kendala dari pengembangan TOD karena moda transportasi yang terintegrasi seperti MRT dan LRT kebanyakan masih dalam tahap konstruksi.

Adapun, kelebihan properti yang dekat dengan jalan tol, kata Angra, adalah aksesibilitas yang baik terhadap berbagai tujuan atau pusat aktivitas dan menghemat waktu tempuh perjalanan.

"Secara umum sama-sama mempersingkat waktu tempuh. Semisal, dulu kalau dipikir rasanya Depok ke Jakarta jauh sekali, sekarang ada tol yang Margonda langsung ke Cawang, misalnya, ada juga kereta dan keretanya sudah nyaman, jadi terasa lebih dekat."

Sementara itu, ada beberapa kendala dalam melakukan penjualan dari kedua konsep, yakni masalah harga.

Angra menyebutkan bahwa sejatinya properti dengan konsep TOD sebaiknya merupakan properti yang harganya terjangkau, terutama untuk konsumen pada segmen menengah yang memiliki mobilitas tinggi ke pusat kota.

Di sisi lain, kemampuan untuk membeli properti di kota besar cukup terbatas sehingga membutuhkan tempat tinggal yang terintegrasi langsung dengan multimoda transportasi massal. Namun, kenyataannya saat ini, makin dekat dengan moda transportasi massal dan dekat dengan jalan tol, harga properti malah makin mahal dan harganya terus naik.

Kemudian, kesadaran konsumen untuk berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi massal juga dinilai masih minim. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa orang masih memiliki kecenderungan memilih pengembangan yang dekat dengan jalan tol.

"Untuk bisa membuat masyarakat memilih TOD, perlu upaya untuk mendidik dan menyadarkan masyarakat saat ini mengenai kelebihan-kelebihan properti yang terintegrasi dengan moda transportasi umum."

Selanjutnya, menurut Angra, belum ada pengembangan yang benar-benar sesuai dengan standar TOD sehingga konsumen masih banyak pertimbangan untuk memutuskan membeli.

"Beberapa pertimbangannya, misalnya, walaupun dekat kereta, interval kedatangannya masih lama. Kemudian, ada beberapa pengembangan yang sebutannya saja TOD, tapi untuk sampai ke stasiun atau terminal masih harus naik ojek dulu atau masih jauh dijangkau dengan jalan kaki. Ya, jadi, belum sepenuhnya TOD."

Angra menambahkan bahwa lokasi yang sudah siap atau paling prospektif untuk disasar menjadi hunian masyarakat saat ini antara lain di daerah barat ada di area Tangerang dan Tangerang Selatan, daerah selatan Depok hingga Sentul, dan daerah timur Bekasi hingga Cikarang.

Lokasi-lokasi tersebut kini sudah didukung oleh infrastruktur yang memadai, tersedia multimoda transportasi massal, aksesibilitas yang baik terhadap amenitas kota, serta masih tersedia properti dengan harga yang masih pada kategori terjangkau bagi konsumen sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok dapat terpenuhi.

TAHAP KONSTRUKSI

Sementara itu, Head of Marketing Rumah.com Ike N. Hamdan menyatakan bahwa salah satu yang menjadi kendala dari pengembangan TOD adalah lantaran saat ini moda transportasi yang terintegrasi seperti moda raya terpadu (MRT) dan lintas rel terpadu (LRT) kebanyakan masih dalam tahap konstruksi sehingga belum ada kepastian.

"Jadi, masyarakat masih hanya bisa mengandalkan jalan tol dan *mentok-mentok* KRL [kereta rel listrik] karena kalau TOD *kan* harus berjalan kaki ke stasiun, ini masih jarang sekali ada. Pengembang kebanyakan juga masih memikirkan potensi yang ada dulu sebelum mengembangkan," ujarnya kepada *Bisnis*, Minggu (17/11).

Hal senada disampaikan Direktur PT Metropolitan Land Tbk. (Metland) Olivia Surodjo yang mengatakan bahwa sebelum melakukan pengembangan TOD yang baru, pengembang juga harus melihat terlebih dahulu lokasi-lokasinya, terutama yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai bentuk kerja sama.

"Karena TOD *kan* awalnya rencana pemerintah juga. Jadi, harus dilihat dulu juga lokasinya. Apabila ketika dikaji memungkinkan dan tanah masih bisa diperoleh pasti kami masih tertarik."

TOD, Akankah Sekadar Ambisi Pebisnis?

Konsep pembangunan perkotaan terintegrasi dengan penataan angkutan massal yang lebih baik kini seakan menjadi prasyarat mutlak keberadaan kota metropolitan. Namun, sudahkah semua pengembang berkomitmen dan benar-benar peduli dengan transportasi massal ini?

Rerata Kinerja Lalu Lintas Kota Metropolitan 2015 (Km/Jam)

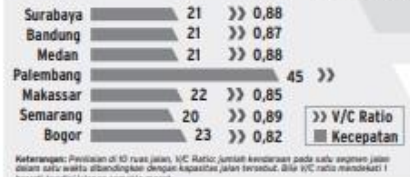

Keterangan: Penilaian di 10 ruas jalan, V/C Ratio: jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu dibandingkan dengan kapasitas jalan tersebut. Bila V/C ratio mendekati 1 berarti kondisi jalanan semakin macet.

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub, 2015
Bisnis/Patricia Cahya Pratiwi

Lokasi dan Kawasan Pengembangan Hunian dan Area Komersial Berkonsep TOD

Perusahaan	Lokasi/Simpul Moda	Transportasi
PT PP Tbk.	Stasiun Juanda	Kereta Api
	Stasiun Manggarai	Kereta api
PT Waskita Karya Tbk.	Stasiun Bogor	Kereta api
Perum Perumnas	Stasiun Tanjung Barat	Kereta api
Stasiun Pondok Cina	Kereta api	
PT Adhi Karya Tbk.	LRT City	LRT
	Bekasi	
	Royal Sentul Park Bogor	
	Jati Cempaka	
	Bekasi Barat	
PT MRT Jakarta	Stasiun Dukuh Atas	MRT
	Stasiun Fatmawati	
	Koridor Cipete Raya	
	(Stasiun Cipete Raya,	
	St. Haji Nawi dan St. Blok A)	
	Stasiun Blok M-Sisingamangaraja	

Sumber: Data Bisnis, diolah

Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap di Beberapa Ruas Jalan Jakarta

Moda Angkutan	Sebelum	Sesudah	%
Penumpang KRL Jabodetabek	1 juta	1,2 juta	20
Penumpang Transjakarta	440.000	616.744	40